

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2020 merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Namun, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Padang Tahun 2020 yang dilakukan hingga Triwulan II menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, dan perubahan lokasi kegiatan serta munculnya wabah covid – 19. Penyesuaian – penyesuaian tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2020 yang mana dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan perubahan APBD Kota Padang Tahun 2020.

Proses penyusunan perubahan APBD Kota Padang Tahun 2020 merujuk kepada Permendagri No. 33 Tahun 2019. Tahapan pertama dimulai dengan penyusunan perubahan RKPD yang dilakukan oleh Bappeda, tahapan kedua adalah menyusun rancangan KUPA dan PPAS-P yang dilakukan oleh Walikota dan dibantu oleh TAPD Kota Padang, kemudian KUPA dan PPAS-P yang telah disusun dibahas oleh Walikota bersama dengan DPRD Kota Padang. Tahap selanjutnya adalah penyusunan surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD. Kepala SKPD kemudian menyusun perubahan RKA-SKPD yang mana

nantinya dokumen ini akan diverifikasi oleh TAPD Kota Padang. Selanjutnya adalah penyiapan Raperda dan Raperwako yang dilakukan oleh PPKD. Tahapan terakhir adalah penetapan APBD yang dimulai dengan penyampaian dan pembahasan Raperda dan Raperwako, evaluasi Raperda dan Raperwako, dan persetujuan perubahan APBD Kota Padang yang ditetapkan oleh Walikota Padang.

5.2 Saran

Terkait dengan masih ada beberapa kendala yang ditemui dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2020, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh OPD untuk menyusun anggarannya sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi kelebihan anggaran.
2. Pengajuan anggaran yang dilakukan oleh OPD kepada Tim Anggaran dapat sesuai dengan deadline yang ditetapkan.
3. Diharapkan agar penyusunan anggaran lebih difokuskan untuk penanganan covid – 19.
4. Kelengkapan kehadiran tim dalam pembahasan anggaran sangat diharapkan agar pembahasan dapat dilakukan dengan sempurna.
5. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan sosialisasi mengenai Perubahan APBD kepada masyarakat sehingga terwujudnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.